

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Demokrasi

Istilah demokrasi berasal dari dua kata yaitu *demos* dan *cratos*, dimana *demos* artinya rakyat dan *cratos* artinya pemerintahan. Sebuah kekuasaan dalam pemerintahan dimulai dari orang-orang yang berada pada tatanan terendah bukan dari yang teratas. Rakyat merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam sistem demokrasi, meskipun secara tidak langsung terlihat mengatur sistem dalam proses pemerintahan, namun melalui pilihan yang mereka pilih sendiri, menentukan hal tersebut.<sup>6</sup> Demokrasi merupakan sebuah sistem pemerintahan yang berasal dari rakyat, dimana rakyat yang menjadi penentu dalam mengambil sebuah keputusan dalam kekuasaan pemerintahan.

Menurut Abraham Lincoln dan Gettyburg (1864), dalam buku yang ditulis oleh Saut Sirait, demokrasi merupakan sebuah sistem pemerintahan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Sistem pemerintahan secara demokrasi merupakan sistem yang menitik beratkan jalannya sebuah sistem pemerintahan terhadap rakyat. Demokrasi menjadikan persetujuan dari rakyat sebagai hal utama yang ditekankan. Keputusan bersama merupakan langkah yang diambil untuk

---

<sup>6</sup>Saut Sirait, *Politik Kisten Di Indonesia Tinjauan Etis* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2006), 30.

menyelesaikan sebuah persoalan melalui musyawarah. Dalam proses musyawarah untuk mengambil sebuah keputusan demokrasi memberikan ruang bagi setiap orang untuk mengambil jalan keluar yang realistis dan juga beralasan dalam sebuah persetujuan. Dalam konteks demokrasi terdapat sistem konstitusi (sifat fundamental dalam negara demokratis) yang diberlakukan untuk memikirkan hak minoritas. Manfaat konstitusi tersebut di antaranya: pengungkapan dari persetujuan rakyat sehingga dapat dengan sungguh memutuskan negaranya sendiri, adanya kepastian tentang tatanan dan bentuk negara, serta memberi, dan juga membatasi kekuasaan pemerintah. Hal lain yang kemudian juga merupakan prinsip yang mendasar dalam demokrasi adalah pengakuan terhadap adanya kesetaraan. Kesetaraan yang dimaksudkan adalah mengakui dan menghormati keberadaan orang lain.<sup>7</sup>

Demokrasi merupakan salah satu metode politik, kemampuan dalam memilih para pemimpin ketika pemilihan dilakukan merupakan sebuah proses demokrasi. Setiap individu dalam mengambil sebuah keputusan harus memperhatikan setiap aturan yang berlaku sehingga terjadi pengambilan keputusan politik yang kompetitif.<sup>8</sup>

Pengambilan keputusan dalam sistem demokrasi harus memperhatikan beberapa prinsip, menurut Robert Dahl dalam tulisan

---

<sup>7</sup>Ibid, 29-31.

<sup>8</sup>Nugroho, "Demokrasi Dan Demokratisasi Sebuah Kerangka Konseptual Untuk Memahami Dinamika Sosial-Politik Di Indonesia.": 2.

Aliyandi terdapat beberapa prinsip demokrasi, di antaranya: setiap orang memiliki hak yang sama dalam menentukan keputusan, kesempatan yang sama bagi setiap orang dalam memberikan keputusan secara kolektif, setiap orang memiliki hak untuk memberikan penilaian terhadap proses politik dan pemerintahan, setiap orang memiliki hak untuk menentukan agenda baik yang harus dibahas maupun yang tidak, serta masyarakat termasuk bagian dalam hal kaitannya dengan hukum.<sup>9</sup>

Untuk merealisasikan prinsip-prinsip dalam sistem demokrasi, melalui sebuah musyawarah untuk mufakat maka, harus memperhatikan kepentingan bersama sebagaimana tujuan akhir dari sebuah proses demokrasi. Menurut Taopan dalam buku yang ditulis oleh Aliyandi, adapun ciri-ciri dari sebuah musyawarah untuk mufakat yaitu: kepentingan bersama menjadi hal yang diprioritaskan, kebebasan berpendapat tanpa paksaan dari orang lain, pengambilan keputusan mengutamakan musyawarah, menggunakan akal sehat dan hati nurani dalam proses musyawarah, bertanggung jawab dalam memberi, menerima, memutuskan, dan melaksanakan hasil keputusan secara moral kepada Tuhan serta menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran maupun keadilan.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup>Aliyandi, "Pelaksanaan Prinsip-Prinsip Demokrasi Dalam Pengambilan Keputusan Studi Pada Badan Permusyawaratan Kampung Tambah Dadi Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah," *Tapis* 03 No.2 (2019): 236.

<sup>10</sup>Ibid, 238, 239.

Kebebasan namun bertanggung jawab dalam mengambil sebuah keputusan bersama melalui musyawarah untuk mufakat, serta kemampuan individu dalam menentukan pilihannya tanpa pengaruh dari orang lain, dengan memperhatikan setiap aturan yang berlaku merupakan prinsip dalam sebuah demokrasi.

Demokrasi mengandung tindakan etis, hal ini dapat dilihat dari adanya rasa tanggung jawab dalam hal kekuasaan untuk diberikan kepada wakil rakyat yang dipilih secara bebas, tanpa paksaan dan mengakui adanya kesamaan hak sebagai warga negara.<sup>11</sup> Demokrasi dilihat dari segi praktik dan prinsip-prinsip dasarnya merupakan sebuah tindakan etis yang berlangsung dengan memperhatikan tindakan-tindakan berdasarkan moralitas (moralitas demokrasi). Namun akhir-akhir ini hal tersebut kemudian tidak terealisasi dengan baik dalam proses demokrasi.

## **B. Politik**

Istilah politik secara etimologi dari bahasa Yunani ialah *politeia* atau *polis* yang artinya negara atau kota. Politik (politics) merupakan segala bentuk kegiatan dalam suatu sistem kenegaraan yang berkaitan dengan penentuan tujuan serta melaksanakan tujuan-tujuan tersebut

---

<sup>11</sup>Hendra Nurtjahjo, *Filsafat Demokrasi* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2008), 82.

(Miriam Budiardjo).<sup>12</sup> Usaha yang dilakukan dalam sebuah negara atau kota untuk menata dan juga mengatur sistem kenegaraan untuk mencapai sebuah visi dan misi merupakan sebuah kegiatan politik.

Pada tulisan Saut Pasaribu yang berjudul *Aristoteles Politik*, Aristoteles berpendapat bahwa *polis* merupakan sebuah hal yang bersifat alamiah. Terbentuknya keluarga dan desa (*village*) merupakan akibat dari tindakan manusia yang dilakukan secara alamiah, dan hasil dari pertumbuhan desa tersebut disebut sebagai *polis*. Argumennya yang paling terkenal adalah ia menyebut manusia sebagai *political animal* (hewan politis) dimana secara alami manusia dibuat hidup dalam *polis*. Bahkan manusia merupakan pencipta dari *polis* dan sekaligus menjadi penghuni *polis* itu sendiri. Dia menggunakan analogi tangan tanpa tubuh untuk menggambarkan hubungan antara *polis* dengan manusia, sebagaimana tangan tanpa tubuh demikian pula yang terjadi jika manusia tanpa *polis*. Sebab, menurutnya *polis* mendahului individu jadi manusia tidak dapat mengetahui hakikatnya secara tepat tanpa *polis* dan bahkan manusia tidak bisa memenuhi hakikatnya tanpa adanya *polis*.<sup>13</sup>

Menurut Aristoteles dalam buku yang dituliskan oleh Saut Sirait, *polis* tidak hanya berkaitan dengan perkumpulan manusia maupun kawasan geografis saja namun merupakan perpaduan (*compound*) dari

---

<sup>12</sup> Mifdal Alfaqi, "Memahami Indonesia Melalui Perspektif Nasionalisme, Politik Identitas, Serta Solidaritas," *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* No. 2 (2015): 112, 113.

<sup>13</sup>Saut Pasaribu, *Aristoteles Politik* (Yogyakarta: Narasi, Pustaka Prometheus, 2016), x-xi.

keseluruhan. Jati diri politik terletak pada penataan dan sistemnya, dimana penataan merupakan konstitusinya. Tujuan konstitusi adalah sebagai bentuk bagi *polis*, sehingga ketika konstitusi tidak memiliki kemampuan dalam mengatasi permasalahan maka keberadaan *polis* dianggap tidak ada.<sup>14</sup> Dari pandangan Aristoteles tentang kota atau *polis*, bertujuan untuk kehidupan yang baik, dengan adanya kota diharapkan warga kota hidup dalam kualitas hidup yang bermutu baik. Kota merupakan suatu bentuk asosiasi (*koinonia* atau persekutuan) dimana hal tersebut dilakukan untuk kebaikan tertentu dan dari semua bentuk asosiasi atau perkumpulan kota merupakan yang paling tinggi, demikian juga halnya dalam mencapai segala kebaikan.<sup>15</sup> Pada dasarnya manusia tidak bisa terlepas dari kehidupan politik sebab secara alamiah mereka hidup dalam *polis* itu sendiri. Dengan kehadiran *polis* manusia diharapkan mampu untuk hidup dalam kebaikan, sebab tujuan dari *polis* sendiri adalah untuk memperoleh hidup yang baik. *Polis* merupakan perkumpulan atau asosiasi untuk mewujudkan kehidupan bersama yang baik.

Pandangan Aristoteles mengatakan bahwa manusia merupakan makhluk politik (*zoon politikon*) sehingga dalam kehidupannya tidak bisa dipisahkan dari politik. Keikutsertaan warga negara secara aktif dalam

---

<sup>14</sup>Ibid, X.

<sup>15</sup>Ibid, Xiii

kehidupan bernegara merupakan sebuah keharusan, dan hal tersebut merupakan partisipasi dalam hal politik warga negara. Warga negara memiliki kebebasan dan kesederajatan dalam mengambil bagian sebagai yang diperintah dan memerintah. Hal ini dapat dilihat dari pelaksanaan pemilihan umum, dimana setiap warga negara berhak memberikan suaranya dalam memilih pemimpin. Warga negara dan negara merupakan rekan untuk menjalin kerja sama demi pencapaian tujuan bersama.<sup>16</sup> Seiring perkembangan zaman, kemudian muncul cara-cara yang digunakan oleh para politisi untuk mendapatkan kekuasaan dalam politik di antaranya :

### **1. Politik Elektoral**

Politik elektoral merupakan kegiatan dibidang politik untuk memilih atau sering disebut sebagai pemilihan umum.<sup>17</sup> Elektoral menghormati kebebasan dalam berpolitik dan demokrasi sebagaimana rakyat menjadi penentu untuk memilih wakilnya didalam pemerintahan.<sup>18</sup> Pemilihan umum dilakukan untuk memperoleh jabatan politik namun kemudian proses tersebut, banyak upaya yang digunakan oleh para politisi untuk mendapatkan jabatan. Akhir-akhir ini, kemudian menggunakan organisasi keagamaan dalam upaya

---

<sup>16</sup>Raimundus Bulet Damang, "Negara Dan Warga Negara Perspektif Aristoteles," *Dinamika Sosial* 4 No. 2 (2020): 261.

<sup>17</sup>Agus, *Politik Elektoral* (Mataram: LP2M UIN Mataram, 2018), V.

<sup>18</sup>Yonatan Alex Arifianto, "Melawan Money Politics Dalam Elektoral Upaya Mereduksi Kejahatan Politik Masuk Gereja," *Teologi dan Pendidikan Kristiani* 1 No. 1 (2023): 5.

pencapaian jabatan tersebut. Hal ini dapat dilihat dari peristiwa pada saat pemilihan kepala daerah DKI yaitu adanya kasus penistaan agama yang dilakukan oleh Ahok sehingga memunculkan adanya gerakan berupa protes oleh massa yang mengatasnamakan gerakan Islam yang dilakukan secara demonstrasi besar-besaran.<sup>19</sup> Selain hal tersebut, salah satu tantangan gereja terhadap politik elektoral ini adalah adanya *money politics* yang tidak terlepas dari kompetisi elektoral, untuk mempengaruhi pemilih.<sup>20</sup>

Seiring perkembangan teknologi dan informasi khususnya dibidang media sosial, kemudian menjadi sarana politik elektoral. Dalam sudut pandang demokrasi, hal tersebut merupakan hal yang inovatif namun memunculkan sejumlah perdebatan. Dari satu sisi dianggap memberi kemudahan untuk berinteraksi secara luas dengan masyarakat dan disisi lain dianggap sebagai adanya suatu kebebasan yang memberikan penguasaan.<sup>21</sup> Politik yang berbasis teknologi ini dalam aktivitas politik elektoral didominasi oleh kalangan generasi Z, dan para pemuda milenial. Politik elektoral dengan menggunakan teknologi ini digunakan oleh pemilihan presiden pada tahun 2024

---

<sup>19</sup>Tanius Sebastian, "Kesesatan Berpikir Dalam Konteks Hukum Dan Masyarakat: Studi Kasus Politik Elektoral Dan Budaya Media Sosial Di Indonesia," *Paradigma: Jurnal Kajian Budaya* 9 No. 3 (2019): 320.

<sup>20</sup>Arifianto, "Melawan Money Politics Dalam Elektoral Upaya Mereduksi Kejahatan Politik Masuk Gereja.": 7.

<sup>21</sup>Roring Novance Silitonga Franky P, "Politik Digital: Strategi Politik Elektoral Partai Politik Dalam Kampanye Pemilu Presiden," *Communitarian* 4 No. 2 (n.d.): 679–680.



dalam berkompetisi dan memiliki peranan dalam kemenangan partai politik.<sup>22</sup>

## **2. Politik Praktis**

Politik praktis merupakan sebuah upaya yang dilakukan untuk mempertahankan sebuah kedudukan atau memperebutkan kekuasaan melalui kompetisi. Segala upaya, strategi, dan juga taktik dilakukan untuk meraih hal tersebut. Menurut Arsakal, politik praktis merupakan perang antar politikus, hal demikian sebab para politikus tersebut saling beradu dan bersaing dalam memperoleh dukungan masyarakat sehingga memperoleh kekuasaan. Politik praktis bisa digunakan sebagai media bagi politik identitas khususnya pada kelompok-kelompok kecil seperti suku, agama, dan ras yang dijadikan sebagai alat untuk mempengaruhi pilihan pemilih.<sup>23</sup> Politik praktis berhubungan dengan segala hal yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh para politikus sebagai upaya untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan.

## **3. Politik Substansial**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), substansial artinya sesungguhnya yang bersifat inti.<sup>24</sup> Secara substansial, politik sebenarnya memiliki tujuan yang baik. Menurut Aristoteles politik

---

<sup>22</sup>Ibid.

<sup>23</sup>Liputan 6, "Pengertian dan Contoh Politik Praktis," <https://www.liputan6.com> (diakses 18 April 2018).

<sup>24</sup>Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

(*polis*) bertujuan untuk kehidupan yang baik dan bersifat alamiah dan tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia, sebab manusia merupakan makhluk politik secara alami ia dibuat hidup dalam *polis*.<sup>25</sup> Pada dasarnya politik bertujuan untuk hal-hal yang baik seperti untuk kesejahteraan rakyat. Namun, jika diperhatikan pada praktik politik akhir-akhir ini, politik tidak lagi berjalan sesuai dengan semestinya.

### C. Etika Politik

Etika politik atau filsafat moral merupakan bagian dari etika sosial yaitu berhubungan dengan aturan-aturan yang mengatur dan menentukan bagaimana sikap maupun tindakan seseorang terhadap sesamanya dalam bidang kehidupan manusia secara politik.<sup>26</sup> Menurut Franz Magnis Suseno:

Etika politik mempertanyakan tanggung jawab dan kewajiban manusia

sebagai manusia dan bukan hanya sebagai warga negara terhadap negara, hukum yang berlaku dan sebagainya. Dua-duanya, kebaikan manusia sebagai manusia dan kebaikannya sebagai warga negara, memang tidak identik. Apabila negara itu buruk, maka orang yang baik sebagai warga negara, yang dalam segala-galanya hidup sesuai dengan aturan negara buruk itu, adalah buruk, barangkali jahat, sebagai manusia, dan sebaliknya, dalam negara buruk, manusia yang baik sebagai manusia, seseorang yang betul-betul bertanggung jawab, akan buruk sebagai warga negara, karena tidak dapat hidup sesuai dengan aturan buruk negara itu.<sup>27</sup>

---

<sup>25</sup>Pasaribu, *Aristoteles Politik*, xii-xiii.

<sup>26</sup>Franz Magnis Suseno, *Etika Politik Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2016).

<sup>27</sup>*Ibid*, 10.

Tanggung jawab dan kewajiban manusia baik sebagai manusia maupun sebagai warga negara merupakan dua hal yang tidak terpisahkan dan saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya. Manusia yang baik namun buruk secara warga negara tetap memiliki penilaian buruk secara warga negara dan begitupun sebaliknya. Terdapat tiga metode etika politik di antaranya sebagai berikut:

1. Etika Politik dan Ilmu-ilmu Politik Lain

Pembahasan tentang etika politik pada dasarnya tidak cukup dengan hanya menggunakan prinsip-prinsip moral dasar, namun membutuhkan ilmu-ilmu politik yang lain yang berkaitan dengan bagaimana struktur realitas politik dan permasalahan-permasalahannya. Terdapat tiga tingkatan benar atau salah dalam tindakan politik di antaranya: prinsip moral dasar (prinsip keadilan), prinsip terhadap legitimasi kekuasaan secara demokratis, kriteria penilaian disesuaikan dengan zaman dan situasi. Pada tingkatan pertama merupakan hal yang berlaku bagi umum namun belum bisa dioperasionalisasikan karena masih bersifat abstrak dan prinsip tersebut merupakan wewenang etika umum. Kemudian pada tingkat kedua, merupakan prinsip bidang etika politik yang khas, dan prinsip ini pun akan bersifat positif jika acuannya berdasarkan pada bidangnya. Misalnya, pengandaian dari legitimasi demokratis yaitu

pengambilan kebijakan yang konkret merupakan cara yang efektif untuk mengetahui realitas politik kehendak masyarakat. Hal tersebut, merupakan tanggung jawab ilmu-ilmu politik.<sup>28</sup>

## 2. Pendekatan Kritis-Negatif

Etika politik berangkat dari persoalan-persoalan normatif dalam bidang politik itu sendiri. Pada metode ini, disebut sebagai kritis negatif karena dimulai dari kritis terhadap teori-teori dan paham-paham yang ada yang relevan dan diperiksa secara kritis dan bukan bertolak dari ulasan pendapat sendiri. Tindakan kritis yang dimaksudkan ialah memisahkan unsur-unsur nilai yang tidak tepat dan yang tepat. Dan disebut sebagai kritis negatif karena dimulai dari hal-hal yang negatif dan bukan positif, memeriksa dan membongkar pandangan politik yang ada kemudian diuji dan yang tidak tahan uji tidak dipertahankan dan sebaliknya jika tahan uji akan dipertahankan dan dirumuskan sebagai prinsip. Namun, penggunaan kata negatif ini bukan berarti pada penilaian namun dalam arti logis: apa yang tidak tersingkirkan dalam pemeriksaan terhadap pandangan yang ada merupakan proses untuk memperoleh prinsip-prinsip etika politik.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup>Ibid, 21,22.

<sup>29</sup>Ibid, 25,26.

### 3. Pengandaian-pengandaian normatif

Etika politik didasari dengan prinsip-prinsip moral dasar dalam perumusannya. Prinsip dasar tersebut (dalam hal manusia diandaikan apriori dan prima facie), misalnya manusia harus bertindak dengan baik terhadap setiap orang tanpa terkecuali. Hal tersebut, kemudian diwujudkan dalam prinsip kesejahteraan umum, yang kemudian memiliki kesesuaian dengan politik tinggi, dimana tidak melanggar hak dan keadilan dengan tindakan atau kebijakan apapun. Selain prinsip tersebut, prinsip dasar yang lain adalah keadilan. Prinsip keadilan yaitu menghormati hak orang lain, dan menempatkan setiap orang pada kedudukan yang sama. Hal tersebut, kemudian dianggap memiliki kesesuaian dengan etika politik dimana semua orang memiliki kedudukan yang sama dalam masyarakat dan berhak memperoleh perlakuan yang sama. Setiap orang memiliki kebebasan dan berhak atas kebebasannya, dan hanya bisa dibatasi untuk kebebasan yang sama luasnya dengan masyarakat demi kepentingan bersama. Adanya penghormatan terhadap manusia dengan sendirinya akan menciptakan keutuhan yang hakiki.<sup>30</sup>

Etika politik menurut Franz Magnis Suseno, didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan. Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa

---

<sup>30</sup>Ibid, 27.

penekanan pernyataan dalam bukunya tentang etika politik, seperti: “Keyakinan-keyakinan moral inilah yang mendasari etika politik dalam buku ini, yang selalu akan tampak di latar belakang pembahasan terhadap pelbagai posisi”.<sup>31</sup> Pernyataan tersebut menekankan pada prinsip keadilan.

#### **D. Gereja Dan Politik**

Berdasarkan sejarah, keterlibatan gereja dalam politik dimulai sejak abad ke-4 yang merupakan abad perkembangan gereja. Gereja berkembang dengan pesat dan dalam perkembangannya mulai terlibat dalam kegiatan-kegiatan kenegaraan seperti ikut dalam mengambil keputusan-keputusan dalam hal politik, sehingga gereja dalam perkembangannya mendapat pengakuan dan khususnya pada sekitar abad 11-15 mendapat peranan yang lebih besar dalam memperhatikan skema politik dunia.<sup>32</sup>

Namun di era reformasi (abad 16), gereja mengalami kemerosotan dalam hal politik dan mendapat sejumlah tuaian kritik akibat para pemimpin-pemimpin gereja. Pada abad ini muncul sebuah perdebatan yang berkaitan dengan kekuasaan gereja. Pendapat para pemimpin gereja seringkali dianggap sebagai kebenaran yang absolut karena merupakan suara dari Tuhan dan untuk itu harus diikuti. Hal tersebut dianggap sangat

---

<sup>31</sup>Ibid, 29.

<sup>32</sup>Maidiantius T.J Parel T.J, *Politik Yesus Bagi Indonesia* (Tangerang: Matana Bina, 2015), 59.

tidak demokratis sebab mengeluarkan keputusan yang tidak logis atau tidak masuk akal. Selain itu, terjadi kemerosotan moral, seperti dikalangan Paus. Contohnya Paus Baccaccio dan Paus Chaucer, ia ketahuan melakukan percabulan. Hal tersebut kemudian menimbulkan pandangan terhadap gereja rusak dan hilang kepercayaan. Banyak karya tulis yang kemudian muncul, yang memuat tentang kritikan karena perbuatan tidak bermoral tersebut untuk mencemooh para pemimpin gereja. Kemerosotan terkait etika tidak hanya dikalangan Paus namun sampai ketinggian keuskupan, jabatan yang mereka miliki merupakan pertimbangan terhadap politik, keuangan dan kekeluargaan atau nepotisme. Tetapi kemudian pada abad ke-19 terjadi perkembangan dan membukan diri kembali untuk melakukan perubahan terhadap lembaga-lembaga kemasyarakatan.<sup>33</sup>

Keterlibatan gereja dalam kehidupan sosial masyarakat merupakan sebagai perwujudan dari panggilan dan imannya berdasarkan cinta kasih. Gereja dan masyarakat merupakan sebuah hubungan yang fundamental dalam keberadaannya dan dalam konsep berdialog dengan dunia, untuk membuka diri terhadap orang lain dan keluar dari dirinya sendiri untuk kesejahteraan bersama. Kesadaran gereja akan permasalahan dunia yang tidak pada satu kondisi baik saja namun berbagai polemik kemudian muncul merupakan hal yang

---

<sup>33</sup>Ibid, 60-62.

mendorongnya untuk untuk berhubungan dengan sosial masyarakat dan terlibat dengan permasalahan dunia yang semakin rumit dalam dunia modern, serta membantu orang beriman untuk melihat realitas hidupnya. Hubungan Kristus dan pribadi yang mengimani-Nya merupakan dasar gereja dalam keterlibatannya dalam kehidupan dunia.<sup>34</sup>

#### **E. Misi Gereja Tentang Politik**

Misi dalam bahasa Inggris, Jerman, dan Belanda ialah *mission* atau *missie* yang berasal dari bahasa Latin *missio* yang artinya mengirim atau mengutus yang kemudian digunakan dalam kalangan gereja.<sup>35</sup> Misi merupakan sebuah kegiatan perutusan untuk menyebarkan Injil. Misi dan gereja merupakan dua hal yang tidak terpisahkan, dimana gereja merupakan wujud dari gerakan misi dan untuk itu juga gereja perlu menjadi gereja yang misioner. Gereja yang menyadari realitas dari imannya sendiri dan kesadaran akan panggilannya untuk memberitakan penghayatan Injil Yesus Kristus, tanpa hal tersebut, gereja dianggap gagal dalam melakukan tugasnya, dan bahkan dianggap sudah tidak menjadi gereja.<sup>36</sup>

Dalam tulisan Hariato GP, pandangan David W. Ellis tentang misi yaitu:

---

<sup>34</sup>Mateus Mali CSSR, *Konsep Berpolitik Orang Kristiani* (Yogyakarta: Kanisius, 2014), 138, 139.

<sup>35</sup>Harianto GP, *Pengantar Misiologi* (Yogyakarta: Andi, 2012), 5.

<sup>36</sup>J. Andrew Kirk, *Apa Itu Misi? Suatu Penelusuran Teologis* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2015), 36.



Misi adalah panggilan yang tritunggal untuk menyatakan Kristus kepada dunia dengan jalan proklamasi, kesaksian dan pelayanan, sehingga dengan kuasa Roh Kudus Allah dan firman-Nya manusia manusia dibebaskan dari egoisme dan dosanya dan dengan tindakan Allah dilahirkan kembali sebagai anak-anak Allah dan menjadi anggota keluarga Allah dengan jalan percaya akan Dia melalui Yesus Kristus, yang diterimanya sebagai Juruselamat pribadinya dan dilayaninya sebagai Tuhan dalam persekutuan tubuh-Nya, yaitu Gereja untuk kemudian menyatakan Dia kepada dunia.<sup>37</sup>

Misi Allah di tengah-tengah dunia ini yaitu menjadikan gereja sebagai garam dan terang dunia, karena itu gereja memiliki tanggung jawab yang besar di dalam mengemban tugasnya untuk mencapai misi Allah tersebut. Dalam Matius 28:18-20

Yesus mendekati mereka dan berkata: "Kepada-Ku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa murid-Ku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah Kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman."<sup>38</sup>

Pesan tersebut merupakan pesan yang disampaikan Yesus Sebelum Ia naik ke Sorga. Perintah ini disampaikan kepada murid-murid-Nya supaya menyatakan misi Allah bagi dunia agar menjadikan segala bangsa murid-Nya, membaptis dan mengajar serta melakukan semua apa yang diperintahkan oleh Yesus kepada murid-Nya. Hal ini berarti murid-murid dan semua orang percaya kepada Allah harus menyatakan misinya bagi dunia kapanpun dan dimanapun sebagai

---

<sup>37</sup>Hariato GP, *Pengantar Misiologi*, 6.

<sup>38</sup>Robert E. Coleman Jim Putman, Bobby Harrington, *Dicipleshift* (Yogyakarta: Yayasan Gloria, 2005).

perwujudan misi Allah bagi dunia dan tanggung jawab gereja dalam menyatakan misi tersebut melalui pelayanan yang bersifat holistik. Menurut Schuneman dan Huwae, dalam tulisan Yohanis Udju Rohi, pelayanan holistik yaitu:

Kebutuhan manusia secara menyeluruh baik rohani maupun jasmani dalam berbagai situasi kehidupan harus mendapat perhatian dalam pelaksanaan misi. Misi Sang Mesias yaitu Yesus sendiri bercirikan misi yang holistik (band. Yes. 61 dan Luk. 4). Hal ini mencakup pentingnya berita dan keputusan pertobatan dan pemulihan hubungan manusia dengan Allah, dengan sesama dan dengan dirinya sendiri serta pengembangan kehidupan spiritualitas, perjuangan untuk hak-hak asasi manusia, pemeliharaan lingkungan hidup serta bertanggung jawab, pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial, kerukunan kehidupan masyarakat dan berbagai dimensi pelayanan lainnya yang perlu sesuai dengan situasi dan kondisi lokal maupun secara universal.<sup>39</sup>

Salah satu realitas kehidupan ber-gereja adalah saling terkait dengan berbagai macam bidang baik, agama, budaya dan juga pemerintahan secara khusus dalam bidang politik (terlepas dari pandangan Aristoteles yang berpendapat tentang manusia merupakan makhluk politik) dan hal tersebut tidak dapat dihindari sebagai bagian dari warga negara. Sehingga yang harus menjadi perhatian ialah bagaimana gereja tetap melakukan pekerjaannya dengan menghadapi tantangan-tantangan politik yang ada.

Prinsip politik yang dilakukan oleh Yesus menurut Rungkat dalam tulisan Yohanis Udju Rohi yaitu: untuk kemuliaan Allah,

---

<sup>39</sup>Rohi, "Misi Gereja Melalui Dunia Politik."

berdasarkan kedaulatan Allah, memberikan seluruh kehidupan untuk didedikasikan untuk Tuhan, dan bersifat empati dan simpati dalam kasih terhadap Allah dan sesama.<sup>40</sup>

Dalam ajaran kekristenan atau gereja didasarkan pada ajaran Yesus Kristus sendiri. Penebusan yang dilakukan Yesus Kristus melalui kematian-Nya merupakan inti dari iman kristen. Sehingga kehidupan Yesus Kristus khususnya dalam hubungan-Nya dengan politik juga menjadi pedoman sebagai orang percaya kepada-Nya (gereja) dalam melakukan praktik politik. Di dalam kitab Injil Markus 12:13-17, Matius 22:15, dan Lukas 20:22-26 menjadi rujukan untuk melihat hubungan antara Yesus dengan politik, kemudian berpengaruh terhadap rumusan-rumusan politik khususnya yang berkaitan dengan hubungan gereja dan negara.<sup>41</sup> Kehadiran Yesus yaitu untuk melakukan karya penyelamatan-Nya terhadap semua ciptaan-Nya dalam tatanan alam semesta termasuk negara dan rakyat. Analogi hubungan antara negara dan Yesus dalam karya penebusan dan penyelamatan-Nya dapat dilihat dari bagaimana Yesus menerima dan membuka diri bagi semua orang-orang berdosa. Selain hal tersebut, konsep politik Yesus pun dapat dilihat dari pernyataan Yesus tentang hak milik Allah dan kaisar. Yesus menegaskan untuk memberikan kepada Allah apa yang menjadi milik-Nya dan

---

<sup>40</sup>Ibid, 48.

<sup>41</sup>Sirait, *Politik Kristen Di Indonesia Tinjauan Etis*, 114.

kepada kaisar apa yang menjadi milik-Nya. Dari hal tersebut kemudian nampak secara jelas tentang politik teokrasi.<sup>42</sup> Yesus dalam konsep politik tersebut memperlihatkan bahwa salah satu misi Yesus tidak menolak politik namun Ia menyatakan misi-Nya melalui negara (politik) sehingga hal demikian kemudian menjadi landasan bagi gereja untuk melaksanakan misinya.

Gereja dalam pelaksanaan misinya harus didasarkan pada ajaran-ajaran dan nilai-nilai kekristenan serta apa yang menjadi misi Allah bagi dunia termasuk negara (politik). Dari analogi hubungan negara dan Yesus tentang karya penebusan-Nya ada beberapa hal yang menjadi perhatian untuk pekerjaan misi gereja dalam hubungannya dengan politik di antaranya: kesetaraan sesama ciptaan, keadilan, dan mendapatkan hak yang sama.

Misi gereja dalam politik bertujuan untuk kemuliaan Allah dan membawa damai sejahtera. Selain itu gereja diharapkan mampu untuk mengikuti perkembangan politik, dan bahkan aktif didalamnya untuk memberikan sumbangsi terhadap keputusan-keputusan pemerintah dari sudut pandang agama untuk perkembangannya dan tidak hanya menjadi penerima. Gereja bertugas untuk mengarahkan orang-orang kristen

---

<sup>42</sup>Ibid, 117.

untuk mempergunakan hak suaranya secara bertanggung jawab tanpa melupakan ajaran kekristenan.<sup>43</sup>

Yohanis Udju Rohi dalam tulisannya mengatakan bahwa politik bertujuan untuk kesejahteraan rakyat dan hal itu sejalan dengan misi Allah yaitu menghadirkan syalom (damai sejahtera) bagi bangsa-bangsa. Setidaknya ada beberapa hal yang direkomendasikan untuk gereja dalam mewujudkan misi Allah diantaranya: gereja sebagai pernyataan misi Allah di dunia perlu untuk memberikan ide, dan gagasan untuk pendirian bangsa dan negara, gereja harus berperan dalam mengawasi jalannya pemerintahan yang sehat untuk kesejahteraan rakyat, untuk melakukan misi secara holistik artinya dari berbagai bidang kehidupan termasuk bidang politik.<sup>44</sup> Salah satu bentuk pelaksanaan misi Allah yang dilakukan oleh gereja sebagai gereja yang misioner adalah melalui bidang politik.

---

<sup>43</sup>Rohi, "Misi Gereja Melalui Dunia Politik.", 47.

<sup>44</sup>Ibid, 53.